

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi seringkali menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, serta menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dianggap menjadi jawaban atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan. Namun demikian, sampai saat ini belum ada satu indikator pembangunan berkelanjutan yang disepakati bersama.

Penelitian ini mencoba menghitung Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) yang didapat dari perhitungan indeks komposit komponen pembentuk pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan hidup, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (dimensi ekonomi), Indeks Pemerataan (dimensi sosial) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dimensi lingkungan hidup). IPB dihitung dari data tingkat provinsi di Indonesia tahun 2009 sampai 2014, untuk dua skenario dengan bobot yang berbeda. Skenario pertama memberi bobot lebih besar pada dimensi ekonomi dan sosial, sedangkan skenario kedua memberi bobot yang seimbang pada masing-masing aspek pembangunan berkelanjutan.

Hasil perhitungan IPB menunjukkan bahwa di 31 provinsi di Indonesia, angka IPB skenario-1 lebih kecil dibanding angka IPB skenario-2, kecuali di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa di sebagian besar provinsi di Indonesia masih menekankan pembangunan ekonomi dan sosial dan mengesampingkan perbaikan kualitas lingkungan, kecuali kedua provinsi tersebut di atas. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa angka IPB terbesar dicapai oleh Kalimantan Timur dan angka IPB terkecil dimiliki oleh Jawa Barat. Beberapa faktor diduga sebagai penyebab tingginya angka IPB di Kalimantan Timur, antara lain: pencapaian IKLH berada pada kategori cukup ($66 \leq \text{IKLH} \leq 74$), pencapaian IPM berada pada status tinggi ($\text{IPM} > 70$) dan pencapaian Indeks Pemerataan di atas rata-rata ($\text{Indeks Pemerataan} > 75,39$). Di sisi lain, Jawa Barat yang menempati urutan terakhir dalam pencapaian IPB, diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, terdapat bencana banjir, dan

polusi udara yang tinggi dapat terlihat melalui pencapaian IKLH berada pada kategori waspada (IKLH<50). Selain pencapaian IKLH, IPM yang dicapai pun tidak tinggi hanya 68,80. IPM yang rendah diduga karena pencapaian Indeks kesehatan yang masih rendah di Jawa Barat. Pencapaian Indeks Pemerataan juga masih dibawah rata-rata, hal ini disebabkan oleh tingginya kesenjangan pendapatan yang ada di Jawa Barat.

5.2. Rekomendasi Kebijakan dan Penelitian Selanjutnya

Kecenderungan angka IPB skenario-2 yang lebih tinggi dibanding angka IPB skenario-1 menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan masih belum merupakan prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Hal tersebut juga menandakan bahwa kelestarian lingkungan belum dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, padahal kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan terganggunya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang hanya menitikberatkan pembangunan ekonomi dan sosial perlu diubah menjadi pembangunan yang juga memperhitungkan kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan perlu terus dipromosikan antara lain dengan cara memperkenalkan indikator yang lebih menyeluruh (komprehensif). Salah satu kelemahan penelitian ini adalah penggunaan IKLH yang hanya mencakup tiga unsur kualitas lingkungan, yaitu: indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan hutan. Kualitas lingkungan yang lain perlu pula diperhitungkan, misalnya: keanekaragaman hayati, dan kualitas sumber daya kelautan. Perhitungan Indeks Pembangunan Berkelanjutan yang lebih menyeluruh tentu akan lebih mencerminkan kondisi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2003). *Pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia*. Denpasar: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks pembangunan manusia 2014 metode baru*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Indeks pembangunan manusia 2010-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Indeks pembangunan manusia 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brundtland Commission. (1987). *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*. UN Documents Gatheringa Body of Global Agreements.
- Fauzi, Akhmad & Oxtavianus, Alex. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. Bogor: Faculty of Economic and Management - Bogor Agricultural University. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 68-83.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2010). *Indeks kualitas lingkungan hidup 2014*. Jakarta: Assisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2011). *Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia 2010*. Jakarta: Assisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). *Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia 2010*. Jakarta: Assisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015). *Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

- Kondyli, J. (2010). Measurement and evaluation of sustainable development: A composite indicator for the islands of the North Aegean region, Greece. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(6), 347-356.
- Koto, Mahyadin. (2015). *Pengukuran Indeks Pembangunan Berkelanjutan 33 Provinsi di Indonesia*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
- OECD. (2008). *Handbook on constructing composite indicator: Methodology and user guide*. Paris: OECD.
- Slaper, T. F., & Tanya, J. Hall. (2011). *The triple bottom line: what is it and how does it work?*. Indiana Business Review, 86(1), 4-8.
- UNDP. (2015). *Human development report 2015: work for human development*. New York: United Nations Programme.
- United Nations. Department of Economic. (2007). *Indicators of sustainable development: Guidelines and methodologies*. United Nations Publications.
- WCED, U. (1987). Our common future. *World Commission on Environment and Development Oxford University Press*.
- Yanti, Fitri & Rasmini, Ni Ketut. (2015). *Analisis pengungkapan triple bottom line dan faktor yang mempengaruhi: studi di perusahaan Indonesia dan Singapura*. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udayana. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.